

Judul : Elpiji Non Subsidi Terbang, Gas Melon Jadi Peralihan
Tanggal : Selasa, 01 Maret 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 13

Elpiji Non Subsidi Terbang, Gas Melon Jadi Peralihan

Kenaikan harga elpiji nonsubsidi bisa menyebabkan masyarakat beralih ke elpiji subsidi 3 kg

**Filemon A Hadiwardoyo,
M Krishna Prana Julian**

JAKARTA. Pertamina resmi menaikkan harga elpiji (LPG) nonsubsidi (Bright Gas 5,5 kilogram dan elpiji 12 kg), per Minggu (27/2). Harga baru elpiji non-subsidi naik menjadi Rp 15.500 per kg. Adapun harga elpiji subsidi 3 kg tak berubah di Rp 11.000 per kg.

Pjs. *Corporate Secretary* PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, kenaikan harga elpiji nonsubsidi mengikuti perkembangan terkini industri migas global.

Dia memastikan, penyesuaian harga elpiji nonsubsidi telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG. "Harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di kawasan ASEAN," imbuh Irto.

Segmentasi pengguna elpiji nonsubsidi sudah jelas. Untuk itu, masyarakat pengguna elpiji nonsubsidi diharapkan tidak beralih ke elpiji subsidi.

"Kami akan terus memantau stok dan penyaluran elpiji kepada masyarakat. Kami juga akan terus mengedukasi untuk memastikan penyaluran elpiji tepat sasaran," ucap Irto.

kepada KONTAN, kemarin.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai, kenaikan harga elpiji nonsubsidi berpotensi mendorong banyak konsumen beralih menggunakan elpiji subsidi 3 kg alias gas melon.

"Ini logis, karena gas melon disubsidi, harganya beda jauh, sementara kualitasnya sama. Siapapun akan memilih yang murah," terang dia, kemarin.

Efek lainnya, kenaikan harga elpiji nonsubsidi berpotensi mendorong praktik pengoplosan dan bisa menimbulkan risiko keamanan. Tulus menyarankan, disparitas harga antara elpiji subsidi dan elpiji nonsubsidi diperkecil untuk mencegah risiko ini. "Selain itu distribusi gas elpiji 3 kg harus dijadikan tertutup, tidak terbuka seperti saat ini," imbuh dia.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha mengungkapkan, dengan kondisi elpiji yang merupakan satu komoditas dengan dua harga, maka perlu ada perubahan pola distribusi khususnya untuk elpiji subsidi 3 kg. Apalagi kenaikan harga elpiji nonsubsidi berpotensi

membuat masyarakat beralih ke elpiji subsidi.

"Pola distribusi elpiji 3 kg harus menggunakan pola distribusi tertutup, sehingga terhindar dari perpindahan pengguna nonsubsidi ke subsidi," ujar dia, Senin (28/2).

Satya mengungkapkan, perubahan ini mendesak mengingat kenaikan harga komponen elpiji yang terus terjadi. Selain itu, saat ini Indonesia masih harus mengimpor elpiji dalam jumlah besar setiap tahun. "Mesti diingat, lebih dari

65% komponen elpiji adalah impor," jelas Satya.

Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto mengungkapkan, ada upaya lain yang juga bisa dilakukan, yakni dengan produk alternatif. "(Bisa) pakai kompor listrik dan segera memproduksi DME," kata dia, kemarin.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak kenaikan harga elpiji nonsubsidi. Apalagi, pada akhir tahun lalu Pertamina sudah mengerek harga elpiji nonsubsidi.

"Elpiji non subsidi baru naik pada 25 Desember 2021, kok 28 Februari 2022 sudah naik lagi. Sebelumnya 12 Februari 2022 Pertamina sudah menaikkan harga tiga jenis BBM non subsidi," ungkap dia.

Kondisi ini bisa memberatkan masyarakat. Bukan tak mungkin masyarakat akan beralih memakai elpiji subsidi. Untuk itu, Mulyanto mengusulkan perbaikan skema subsidi elpiji. Perlu ada perbaikan skema subsidi menjadi lebih tepat sasaran. ■

Kenaikan Harga Migas Menekan Anggaran

TREN penguatan harga minyak mentah dan elpiji (LPG) akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaksir beban subsidi BBM dan elpiji bisa meningkat.

"Beban subsidi, khususnya BBM dan LPG juga meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN 2022. Belum lagi biaya kompensasi BBM. Namun yang pasti, pemerintah terus mengamankan pasokan BBM dan LPG," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Agung Pribadi, dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Subsidi BBM dan elpiji 3 kg dalam APBN

2022 ditetapkan Rp 77,5 triliun. Subsidi mengacu asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US\$ 63 per barel.

Kenaikan ICP menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat, sehingga menambah beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN. Hitungan Kementerian ESDM, setiap kenaikan US\$ 1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi elpiji Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, serta beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun.

Mengacu data sementara, ICP per 24 Februari 2022 mencapai US\$ 95,45 per barel, lebih besar dari asumsi APBN. ■